

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi geografis

BPP Marapalam Merupakan salah satu BPP yang berada di Kota Padang, Kota Padang terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sekitar 694,96 km². Secara astronomis Kota Padang terletak antara 0°44'00" Lintang Selatan sampai 1°08'35" Lintang Selatan dan antara 100°05'05" Bujur Timur sampai 100°34'09" Bujur Timur. Kota Padang memiliki ketinggian wilayah berkisar antara 0–1.853 meter di atas permukaan laut (mdpl). Suhu rata-rata Kota Padang berada pada kisaran 22°C sampai 31°C dengan curah hujan rata-rata sekitar 3.500–4.000 mm/tahun. Secara topografis, Kota Padang terdiri atas wilayah pantai, dataran rendah, serta perbukitan yang berada di bagian timur kota (BPS Kota Padang, 2024).



Gambar 1. Kondisi Geografis Kota Padang

Kota Padang secara administratif terdiri atas 11 kecamatan dan 104 kelurahan dengan luas wilayah daratan sebesar 694,96 km². Kecamatan yang terdapat di Kota Padang meliputi Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah. **Wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Marapalam meliputi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Padang Selatan, Padang Timur, dan Pauh. Adapun penggunaan lahan di BPP Marapalam dapat di lihat pada tabel berikut**

Tabel 1 Penggunaan lahan di wilayah kerja BPP Marapalam

No	Kecamatan	Tahun	Sawah (ha)	Kebun/Tegal (ha)	Pekarangan (ha)
1	Pauh	2024	762,18	464,00	10.163,00
2	Lubuk Kilangan	2024	3.961,49	3.566,00	30,46
3	Bungus Teluk Kabung	2024	790,00	380,00	234,00
4	Padang Timur	2024	82,18	10,00	9,00
5	Padang Selatan	2024	7,95	84,00	9,45

Sumber: BPS Tahun 2025

Di Kota Padang terdapat tiga Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yaitu BPP Marapalam, BPP Koto Tangah, dan BPP Nanggalo. Dalam penelitian ini, BPP Marapalam dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu BPP yang melaksanakan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kota Padang. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Marapalam merupakan unit pelaksana penyuluhan pertanian yang berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian Kota Padang dan berperan dalam kegiatan penyuluhan, pendampingan kelompok tani, serta pengawalan program pemerintah di bidang pertanian, termasuk Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (Dinas Pertanian Kota Padang, 2024).

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2024, jumlah penduduk Padang mencapai sekitar 939.112 jiwa yang terdiri dari 469.126 jiwa laki-laki dan 469.986 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Padang mencapai sekitar 1.351 jiwa per km², yang menunjukkan bahwa Kota Padang merupakan salah satu wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Provinsi Sumatera Barat (BPS Kota Padang, 2024). Data jumlah penduduk Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 2. Data jumlah penduduk Kota Padang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

NO	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bungus Teluk Kabung	13.925	13.366	27.291
2	Lubuk Kilangan	29.342	28.676	58.018
3	Padang Selatan	28.904	29.781	58.685
4	Padang Timur	39.617	40.618	80.235
5	Pauh	39.852	38.971	78.823
Total		151.640	151.412	303.052

Sumber : BPS Kota Padang Tahun (2024)

Struktur penduduk Kota Padang berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada pada usia produktif (15–64 tahun). Berdasarkan data BPS Kota Padang tahun 2024, penduduk usia produktif mencapai sekitar 68,5%, sedangkan kelompok usia muda (0–14 tahun) sekitar 24,1% dan kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) sekitar 7,4% (BPS Kota Padang, 2024). Dominannya jumlah penduduk usia produktif ini menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan pertanian perkotaan.

Kondisi pendidikan masyarakat di Kota Padang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2024, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas telah menamatkan pendidikan menengah. Persentase penduduk tamat SMA/ sederajat mencapai sekitar 35,6%, tamat SMP/ sederajat sebesar 20,8%, tamat SD/ sederajat sebesar 21,4%, sedangkan penduduk yang menempuh pendidikan tinggi mencapai sekitar 16,7% (BPS Kota Padang, 2024). Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif baik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Padang memiliki kemampuan yang cukup dalam menerima informasi, inovasi, dan teknologi, termasuk dalam pelaksanaan program pertanian perkotaan dan kegiatan penyuluhan pertanian.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Padang juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Akses masyarakat terhadap penggunaan smartphone dan internet semakin luas, terutama pada wilayah perkotaan. Kondisi ini mendukung proses penyebaran informasi pertanian dan kegiatan penyuluhan berbasis digital yang dilakukan oleh penyuluh pertanian maupun Balai Penyuluhan Pertanian.

B. Gambaran umum BPP Marapalam

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Marapalam merupakan salah satu lembaga penyuluhan pertanian yang berada di bawah Dinas Pertanian Kota Padang dan memiliki peran dalam pelaksanaan penyuluhan, pendampingan petani, serta pengembangan program pembangunan pertanian di wilayah kerjanya. BPP Marapalam beralamat di kawasan Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Secara umum, wilayah kerja BPP Marapalam meliputi beberapa kecamatan di Kota Padang, yaitu Kecamatan Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Lubuk Kilangan, Pauh, dan Bungus Teluk Kabung. Wilayah tersebut memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, dataran rendah, hingga daerah perbukitan yang masih memiliki potensi pertanian dan pemanfaatan pekarangan rumah tangga (Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2024).

Dalam menjalankan tugasnya, BPP Marapalam berfungsi sebagai pusat koordinasi kegiatan penyuluhan pertanian, pembinaan kelompok tani, serta pendampingan masyarakat dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di Kota Padang. BPP Marapalam memiliki visi untuk mewujudkan penyuluhan pertanian yang maju, mandiri, dan modern dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, BPP Marapalam menjalankan beberapa misi, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan, memperkuat kelembagaan petani dan kelompok tani, serta mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian perkotaan dan pemanfaatan pekarangan (Kementerian Pertanian, 2019).

Salah satu program yang didampingi oleh BPP Marapalam adalah Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal. Dalam pelaksanaannya, penyuluh pertanian berperan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT), mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan program. Keberadaan BPP Marapalam diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam

mengembangkan usaha pertanian yang berkelanjutan sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang (Kementerian Pertanian, 2023).

C. Profil responden dan informan kunci Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) penerima Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang berada di bawah naungan BPP Marapalam Kota Padang. Kelompok wanita tani yang dijadikan responden penelitian dipilih sebagai perwakilan dari setiap kecamatan yang termasuk dalam cakupan BPP Marapalam, yaitu KWT Pisang, KWT Beringin, KWT Usaho Bundo, KWT Batang Arau, dan KWT Aur Kuning. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 110 orang anggota kelompok wanita tani. Penentuan jumlah responden dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 15%, sehingga diperoleh jumlah responden sebanyak 32 orang. Adapun identitas responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi umur, tingkat pendidikan, dan pekerjaan responden. Berikut identitas responden penelitian yang disajikan pada Tabel 10.

Tabel 3. Profil responden penelitian dan informan kunci

No	Keterangan	Jumlah Responden	Jumlah informan kunci
1	Jenis Kelamin		
	a. Laki Laki		1
	b. Perempuan	32	4
2	Umur		
	a. 32-39 Tahun	13	3
	b. 40–47 Tahun	15	2
	c. 48- 56 ahun	4	
3	Pendidikan		
	a. Tidak Tamat SD	1	
	b. SD/Sederajat	4	
	c. SMP/Sederajat	9	
	d. SMA/Sederajat	15	
	e. Perguruan Tinggi	3	5
4	Lama Bergabung di KWT/menjadi penyuluh		

No	Keterangan	Jumlah Responden	Jumlah informan kunci
a.	< 3 Tahun	9	1
b.	3–10 Tahun	16	1
c.	> 10 Tahun	7	3
Total		32	5

Berdasarkan Tabel 10, profil responden dan informan kunci dikelompokkan menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, lama bergabung dengan KWT yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Responden Penelitian

a. Jenis kelamin

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 32 orang. Hal ini sesuai dengan karakteristik Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dilaksanakan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai wadah pemberdayaan perempuan. Pemerintah menempatkan perempuan sebagai kelompok penting dalam P2L karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan pangan rumah tangga dan pemanfaatan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga (kementan, 2021)

b. Umur

Berdasarkan klasifikasi BPS, usia produktif berada pada rentang 15–64 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden berada dalam rentang usia tersebut, dengan umur antara 32–56 tahun. Responden paling banyak berada pada kelompok umur 40–47 tahun, yaitu sebanyak 15 orang (46,88%), kemudian kelompok umur 32–39 tahun sebanyak 13 orang (40,63%), dan kelompok umur 48–56 tahun sebanyak 4 orang (12,50%). Dengan demikian, seluruh responden termasuk dalam kelompok usia produktif sehingga masih memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan P2L. kegiatan P2L.

c. Tingkat pendidikan

Responden memiliki tingkat pendidikan yang beragam, dengan mayoritas merupakan tamatan SMA/ sederajat sebanyak 15 orang, diikuti SMP/ sederajat 9 orang, SD/ sederajat 4 orang, perguruan tinggi 3 orang, dan tidak tamat SD 1 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota KWT memiliki pendidikan yang cukup untuk mendukung penerimaan informasi dan pemahaman terhadap kegiatan P2L. Menurut Soekanto (2012), tingkat pendidikan berperan dalam membentuk pola pikir dan kemampuan seseorang dalam menerima serta memahami informasi, sehingga pendidikan dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, keberagaman tingkat pendidikan responden menjadi salah satu karakteristik yang dapat memengaruhi kemampuan anggota dalam memahami dan melaksanakan kegiatan P2L.

d. Lama bergabung di KWT

Berdasarkan hasil penelitian, lama bergabung responden dalam KWT bervariasi, yaitu kurang dari 3 tahun sebanyak 9 orang, 3–10 tahun sebanyak 16 orang, dan lebih dari 10 tahun sebanyak 7 orang. Mayoritas responden telah bergabung selama 3–10 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota telah memiliki pengalaman dalam mengikuti kegiatan kelompok. Menurut Anindita et al. (2019), semakin lama seseorang menjadi anggota KWT, semakin banyak pengalaman dan interaksi yang diperoleh selama berada dalam kelompok. Pengalaman tersebut dapat membantu anggota dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, lama bergabung dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengalaman dan kemampuan anggota dalam mengikuti kegiatan KWT.

2. Informan Kunci

Adapun informan kunci dalam penelitian ini terdiri atas 5 orang penyuluh pertanian yang berasal dari BPP Marapalam, dengan komposisi 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Seluruh informan kunci berada pada kelompok usia produktif, yaitu 15–55 tahun, serta seluruhnya telah menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa para penyuluh memiliki bekal akademik yang memadai dalam melaksanakan tugas pendampingan dan

memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Berdasarkan lama pengalaman bertugas, sebanyak 1 orang informan kunci memiliki pengalaman antara 3–10 tahun, sedangkan 3 orang telah bertugas lebih dari 10 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informan kunci memiliki pengalaman yang cukup dalam mendampingi kegiatan kelompok, khususnya dalam pelaksanaan Program P2L, sehingga informasi yang diberikan dapat digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi dan memperkuat hasil penelitian yang diperoleh dari responden.

D. Evaluasi Pelaksanaan P2L Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2023 dilakukan menggunakan Discrepancy Model yaitu model evaluasi yang membandingkan standar pelaksanaan program dengan kondisi aktual di lapangan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian maupun kesenjangan yang terjadi. Dalam penelitian ini, standar yang digunakan mengacu pada Petunjuk Teknis Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2023, sedangkan kondisi aktual diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada responden. Evaluasi mencakup lima aspek, yaitu sarana perbenihan, demplot, pemanfaatan pekarangan, sarana pascapanen, serta pendampingan dan pengawasan, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan Program P2L telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis. Hasil evaluasi pelaksanaan Program P2L secara keseluruhan disajikan pada Tabel 11.

Tabel 4. Evaluasi Pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2023

No	Variabel	Skor diperoleh	Kategori
1	Sarana Perbenihan	128	Sesuai
2	Demplot	96	Sesuai
3	Pemanfaatan Pekarangan	128	Sesuai
4	Sarana Pascapanen	128	Sesuai
5	Pendampingan dan Pengawasan	128	Sesuai
Total		608	Sesuai

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa skor evaluasi pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2023 pada Kelompok Wanita Tani di bawah pembinaan BPP Marapalam Kota Padang adalah sebesar 608 dengan kategori sesuai. Berdasarkan kategori penilaian yang telah ditetapkan, hasil tersebut termasuk ke dalam kategori sesuai. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program P2L telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis P2L Tahun 2023.

Untuk melihat kesesuaian pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dilakukan perbandingan antara persyaratan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) P2L Tahun 2023 dengan kondisi pelaksanaan program di lapangan. Perbandingan tersebut mencakup lima tahapan utama, yaitu sarana pembenihan, demplot, pemanfaatan pekarangan, sarana pascapanen, serta pendampingan, pengawalan, dan evaluasi. Kesesuaian antara ketentuan Juknis dan pelaksanaan di lapangan menunjukkan sejauh mana setiap kelompok penerima manfaat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan persyaratan program. Secara ringkas, perbandingan antara ketentuan Juknis P2L Tahun 2023 dan pelaksanaan Program P2L di lapangan disajikan pada Tabel 12.

Tabel 5. Perbandingan antara Juknis dan pelaksanaan program

No	Kegiatan	Ketentuan Juknis	Pelaksanaan di Lapangan	Kategori
1	Sarana Pembenihan	a. Rumah benih b. Media tanam c. Benih bermutu d. Rak semai	a. Rumah benih 5 × 4 m Rangka baja ringan b. Tanah 10 karung, sekam, Pupuk, kandang c. Tersedia Benih bermutu d. Rak semai permanen dengan 20 baki	Sesuai
2	Demplot	a. Dekat dengan rumah benih b. Luas minimal 150 m ² atau minimal 250 polybag	a. Demplot Berdekatan dengan rumah benih b. 1 kelompok menggunakan 275 polybag c. Media praktik budidaya	Sesuai

No	Kegiatan	Ketentuan Juknis	Pelaksanaan di Lapangan	Kategori
3	Pemanfaatan Pekarangan	c. Fungsi Lahan percontohan, Media, pembelajaran		Sesuai
		a. Pekarangan/ alternatif	a. Penanaman di pekarangan anggota	
		b. Minimal 18 m ² / minimal 30 polybag	b. 13 anggota menggunakan 30 polybag	
		c. Menggunakan bibit dari rumah benih	c. Menggunakan bibit dari rumah benih	
4	Sarana Pascapanen	d. Hasil untuk konsumsi dan dapat dijual	d. Hasil untuk konsumsi dan sebagian dijual,	Sesuai
		a. Keranjang panen	a. 2-6 keranjang Panen	
		b. Plastik pengemas	b. Plastik asoy	
		c. Timbangan	c. Timbangan kapasitas 10 kg	
5	Evaluasi dan pendampingan	a. Evaluasi dan pendampingan	a. Evaluasi dan pendampingan dilakukan 1 kali per bulan	Sesuai

1. Sarana pembenihan

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa sarana perbenihan memperoleh skor sebesar 128 dari skor maksimum 128 atau berada pada kategori sesuai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sarana perbenihan yang menjadi komponen Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah tersedia dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok wanita tani di wilayah kerja BPP Marapalam.

Tabel 6. Hasil evaluasi Sarana Pembenihan

No	Indikator	Ya	Tidak	Skor	Kategori
1	Kelompok memiliki rumah benih yang digunakan untuk kegiatan perbenihan	32	0	32	Sesuai
2	Tersedia media tanam untuk kegiatan penyemaian benih	32	0	32	Sesuai
3	Kelompok menerima benih yang bagus sesuai kebutuhan budidaya	32	0	32	Sesuai
4	Kelompok memiliki peralatan penyemaian (rak tanam, tray semai, dll)	32		32	Sesuai
Total				128	Sesuai

Seluruh kelompok telah melaksanakan komponen penyediaan sarana perbenihan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis. Seluruh kelompok telah memiliki rumah benih yang dimanfaatkan sebagai tempat penyemaian sebelum bibit dipindahkan ke demplot maupun pekarangan anggota. Rumah benih tersebut berupa bangunan permanen berbahan rangka baja ringan dengan ukuran sekitar 5 meter $\times$ 4 meter dan tinggi 3,5 meter. Rumah benih dibangun di atas lahan milik kelompok sehingga memudahkan anggota dalam melakukan kegiatan penyemaian, pemeliharaan, dan pengawasan bibit.

Sesuai dengan ketentuan Juknis yang mensyaratkan adanya fasilitas penyemaian, di dalam rumah benih juga telah tersedia rak semai permanen yang dipasang mengelilingi bagian dinding bangunan. Rak tersebut digunakan sebagai tempat meletakkan baki semai sehingga bibit tersusun lebih rapi, mudah dipelihara, serta terlindungi selama proses penyemaian. Setiap rumah benih dilengkapi sekitar 20 baki semai yang masing-masing mampu menampung sekitar 30 bibit tanaman. Dengan kapasitas tersebut, kelompok mampu menghasilkan sekitar 600 bibit dalam satu periode penyemaian untuk memenuhi kebutuhan demplot maupun pekarangan anggota.

Petunjuk teknis juga mengatur penyediaan media tanam sebagai bagian penting dalam kegiatan perbenihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kelompok telah memperoleh media tanam berupa campuran tanah dan sekam sebanyak 10 karung berukuran 50 kilogram. Media tanam tersebut digunakan untuk

menjaga kelembapan, meningkatkan aerasi, serta mendukung pertumbuhan bibit pada fase awal penyemaian. Selain itu, kelompok juga menyediakan pupuk kandang sebanyak 5 karung dengan berat masing-masing 10 kilogram sebagai sumber unsur hara bagi bibit. Ketersediaan media tanam dan pupuk ini menunjukkan bahwa kelompok telah memenuhi kebutuhan dasar penyemaian sesuai dengan ketentuan dalam Juknis P2L.

Komponen lain yang diatur dalam Petunjuk Teknis P2L adalah penggunaan benih bermutu sebagai bahan tanam. Berdasarkan hasil penelitian, benih yang digunakan oleh kelompok berasal dari bantuan program maupun pengadaan secara mandiri menggunakan kas kelompok. Benih yang digunakan merupakan benih hortikultura bersertifikat yang dipilih karena memiliki daya tumbuh yang baik dan mutu yang terjamin. Setiap awal musim tanam kelompok memperoleh atau membeli benih dalam kemasan seberat 10 gram yang berisi sekitar 3.200 benih. Benih tersebut terdiri atas berbagai komoditas hortikultura, seperti cabai, tomat, sawi, dan kangkung, yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok dan pola tanam yang diterapkan. Penggunaan benih bermutu tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis P2L yang menekankan pentingnya kualitas benih sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan budidaya.

Pada komponen sarana pembibitan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan di wilayah kerja BPP Marapalam telah sesuai dengan ketentuan Juknis P2L, dengan tingkat kesesuaian sebesar 100%. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Fauzi et al. (2022) pada KWT Jati Mandiri, yang menunjukkan bahwa sarana pembibitan telah sesuai dengan Juknis, terutama dari aspek luas pembibitan yang memenuhi ketentuan minimal 20 m². Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa penyediaan sarana pembibitan merupakan salah satu komponen P2L yang dapat dilaksanakan sesuai dengan standar program apabila kelompok mampu memenuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tidak terdapat kesenjangan antara standar dan pelaksanaan sarana pembibitan baik pada penelitian Fauzi et al. (2022) maupun pada penelitian ini.

2. Demonstrasi Plot

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa komponen demplot memperoleh skor sebesar 96 pada kategori sesuai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh kelompok telah memiliki demplot yang digunakan sebagai lokasi budidaya bersama sesuai dengan ketentuan Program P2L. Hasil evaluasi di sajikan pada Tabel 14

Tabel 7. Hasil evaluasi Demonstrasi Plot

No	Indikator	Ya	Tidak	Skor	Kategori
1.	Kelompok memiliki lahan demplot yang digunakan untuk budidaya secara kolektif	32	0	32	Sesuai
2.	Lokasi demplot berada pada lokasi yang sama dan berdekatan dengan rumah benih	32	0	32	Sesuai
3.	Demplot memiliki luas 150 m ² atau setara $\pm$ 250 polybag	32	0	32	Sesuai
Total				96	Sesuai

Seluruh kelompok telah memiliki demplot yang memenuhi ketentuan tersebut. Sebagian besar kelompok menggunakan lahan budidaya seluas $\pm$ 150 m² yang berada berdekatan dengan rumah benih sehingga proses pemindahan bibit hasil penyemaian dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Sementara itu, satu kelompok menerapkan sistem budidaya menggunakan 275 polybag. Jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal dalam Petunjuk Teknis, yaitu sebanyak 250 polybag, sehingga tetap memenuhi ketentuan pelaksanaan Program P2L.

Demplot dimanfaatkan sebagai lahan percontohan bagi seluruh anggota kelompok dalam menerapkan teknik budidaya hortikultura yang dianjurkan melalui Program P2L. Bibit yang telah disemai di rumah benih terlebih dahulu dipindahkan ke demplot untuk dibudidayakan sebagai contoh penerapan teknologi sebelum dikembangkan pada pekarangan anggota. Berbagai komoditas hortikultura, seperti cabai, tomat, sawi, dan kangkung, ditanam di demplot sehingga anggota dapat mengamati secara langsung setiap tahapan budidaya, mulai dari penanaman, penyiraman, pemupukan, penyiangan gulma, hingga pengendalian organisme pengganggu tanaman. Dalam pelaksanaannya, penyuluh pertanian memanfaatkan demplot sebagai media penyuluhan dengan memberikan contoh secara langsung

mengenai teknik budidaya yang baik. Anggota tidak hanya memperoleh penjelasan secara teori, tetapi juga ikut mempraktikkan setiap tahapan budidaya melalui kegiatan gotong royong dan jadwal piket yang telah disepakati bersama. Apabila ditemukan kendala selama proses budidaya, seperti serangan hama atau penyakit, penyuluh bersama anggota melakukan pengamatan di demplot dan mendiskusikan tindakan pengendalian yang tepat. Pengalaman tersebut kemudian menjadi pembelajaran bagi anggota untuk diterapkan pada pekarangan rumah masing-masing. Dengan demikian, demplot tidak hanya berfungsi sebagai tempat budidaya, tetapi juga sebagai media pembelajaran dan transfer teknologi yang memungkinkan anggota memperoleh pengalaman praktik sebelum menerapkannya secara mandiri.

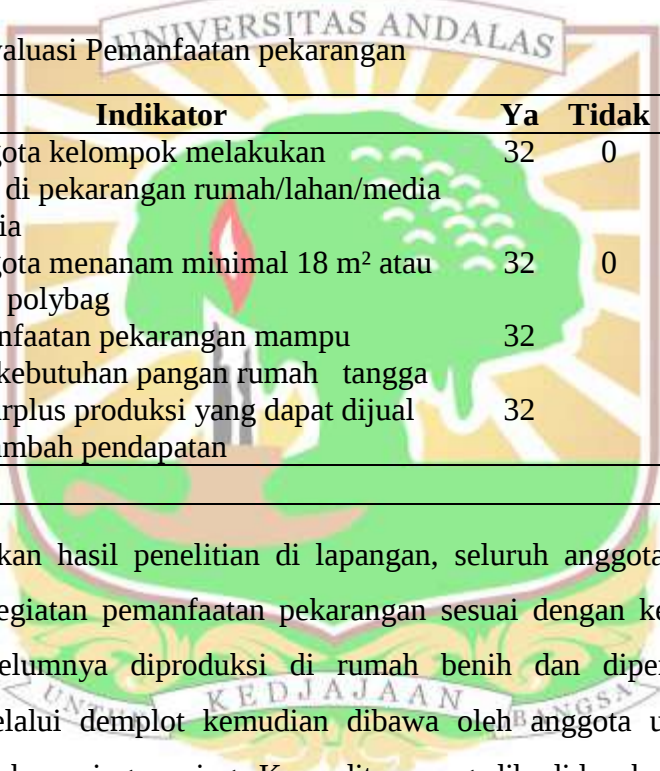
Selain berfungsi sebagai lahan percontohan, demplot juga menjadi usaha bersama yang memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok. Hasil panen yang diperoleh dari demplot sebagian dimanfaatkan oleh anggota kelompok untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan sebagian lainnya dijual. Pendapatan dari hasil penjualan tersebut dimasukkan ke dalam kas kelompok dan dimanfaatkan kembali untuk mendukung keberlanjutan kegiatan P2L, seperti pembelian benih, media tanam, pupuk, maupun kebutuhan operasional kelompok. Pola pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa demplot tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian kelompok melalui pengelolaan usaha secara kolektif.

Pada komponen demplot, hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 100% antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan Juknis P2L. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Fauzi et al. (2022), yang menemukan bahwa pelaksanaan demplot pada KWT Jati Mandiri telah sesuai dengan Juknis, dengan luas demplot 500 m² yang memenuhi ketentuan luas 400–500 m². Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan demplot pada kedua lokasi telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam program. Dengan demikian, tidak ditemukan kesenjangan antara ketentuan Juknis dengan pelaksanaan demplot di lapangan, sehingga komponen demplot dapat dikategorikan sesuai dengan standar P2L.

3. Pemanfaatan Pekarangan

Berdasarkan Tabel 15 diketahui bahwa komponen pemanfaatan pekarangan memperoleh skor sebesar **128** dan berada pada kategori **sesuai**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh anggota kelompok telah memanfaatkan pekarangan rumah atau media tanam yang tersedia untuk kegiatan budidaya sesuai dengan tujuan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Hal ini menunjukkan bahwa anggota kelompok telah mengoptimalkan pekarangan sebagai sumber produksi pangan rumah tangga,

Tabel 8. Hasil evaluasi Pemanfaatan pekarangan



No	Indikator	Ya	Tidak	Skor	kategori
1.	Setiap anggota kelompok melakukan penanaman di pekarangan rumah/lahan/media yang tersedia	32	0	32	
2.	Setiap anggota menanam minimal 18 m ² atau minimal 30 polybag	32	0	32	
3.	Hasil pemanfaatan pekarangan mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga	32		32	
3.	Terdapat surplus produksi yang dapat dijual untuk menambah pendapatan	32		32	
Total				128	Sesuai

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, seluruh anggota kelompok telah melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan sesuai dengan ketentuan tersebut. Bibit yang sebelumnya diproduksi di rumah benih dan diperkenalkan teknik budidayanya melalui demplot kemudian dibawa oleh anggota untuk ditanam di pekarangan rumah masing-masing. Komoditas yang dibudidayakan meliputi cabai, tomat, sawi, dan kangkung sesuai dengan kebutuhan rumah tangga serta kondisi lingkungan tempat tinggal anggota. Pola tersebut menunjukkan bahwa pekarangan menjadi tempat penerapan teknologi budidaya yang telah dipelajari sebelumnya melalui kegiatan di demplot.

Pelaksanaan pemanfaatan pekarangan disesuaikan dengan kondisi lahan yang dimiliki oleh setiap anggota. Sebagian anggota memiliki pekarangan yang cukup luas sehingga dapat menanam langsung di lahan, sedangkan anggota yang memiliki

keterbatasan lahan memanfaatkan media tanam alternatif berupa polybag. Berdasarkan hasil penelitian, dari 32 responden terdapat 13 anggota yang menggunakan masing-masing 30 polybag sebagai media tanam. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan minimal yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis P2L. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan luas pekarangan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan program karena anggota mampu menyesuaikan metode budidaya dengan memanfaatkan media tanam alternatif yang tersedia.

Dalam pelaksanaannya, anggota menerapkan teknik budidaya yang telah dipelajari melalui kegiatan di demplot. Pengetahuan mengenai penggunaan media tanam berupa campuran tanah, sekam, dan pupuk kompos, teknik penanaman, penyiraman, pemupukan, hingga pengendalian organisme pengganggu tanaman yang sebelumnya dipraktikkan pada lahan percontohan kemudian diterapkan secara mandiri di pekarangan rumah masing-masing. Apabila anggota mengalami kendala selama proses budidaya, mereka dapat berdiskusi dengan penyuluh pertanian maupun sesama anggota kelompok untuk memperoleh solusi. Dengan demikian, pekarangan tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat menanam tanaman pangan, tetapi juga menjadi bukti bahwa anggota telah mampu mengadopsi teknologi budidaya yang diperkenalkan melalui Program P2L dan menerapkannya sesuai dengan kondisi pekarangan yang dimiliki.

Hasil panen yang diperoleh anggota sebagian besar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, terutama kebutuhan sayuran sehari-hari, sehingga dapat mengurangi pengeluaran keluarga untuk membeli sayuran. Apabila hasil panen melebihi kebutuhan konsumsi, sebagian anggota menjual hasil produksinya kepada toko sayur di sekitar lokasi kelompok, masyarakat sekitar, maupun melalui media sosial seperti WhatsApp Group dan Facebook. Berdasarkan hasil wawancara, pada setiap periode panen anggota mampu menjual cabai sekitar 10–15 kg dengan harga rata-rata Rp35.000 per kilogram, sehingga memperoleh penerimaan sekitar Rp350.000–Rp525.000 setiap periode panen. Meskipun jumlah tersebut relatif tidak besar, pendapatan yang diperoleh memberikan tambahan penghasilan bagi rumah tangga sekaligus menunjukkan bahwa pemanfaatan

pekarangan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga memiliki nilai ekonomi sebagaimana yang diharapkan dalam Program P2L.

Pada komponen pemanfaatan pekarangan, hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 100% dengan ketentuan Juknis P2L. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Fauzi et al. (2022), yang menunjukkan bahwa kegiatan pertanian pada KWT Jati Mandiri telah sesuai dengan Juknis, dengan berbagai jenis sayuran yang dibudidayakan, seperti cabai, terung, mentimun, kubis, kembang kol, seledri, daun bawang, dan lencah. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertanian dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan program melalui pemanfaatan lahan untuk budidaya berbagai komoditas hortikultura. Dengan demikian, baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan pertanian di lapangan.

4. Penyediaan Sarana pasca panen

Berdasarkan Tabel 16 diketahui bahwa komponen sarana pascapanen memperoleh skor sebesar 128 atau berada pada kategori sesuai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sarana pascapanen yang diberikan melalui Program P2L telah tersedia dan dimanfaatkan oleh kelompok dalam mendukung penanganan hasil panen.

Tabel 9. Hasil evaluasi Pasca Panen

No	Indikator	Ya	Tidak	Skor	kategori
1.	Kelompok disediakan keranjang panen untuk Tabel 16. Lanjutan	32		32	Sesuai
2.	Kelompok disediakan plastik pengemas untuk menjaga kualitas produk	32		32	Sesuai
3.	Kelompok disediakan timbangan untuk menimbang hasil panen	32		32	Sesuai
4.	Sarana pascapanen membantu meningkatkan nilai tambah dan pemasaran produk	32		32	Sesuai
Total				128	Sesuai

Seluruh kelompok telah memiliki sarana pascapanen sesuai dengan ketentuan tersebut, yaitu berupa keranjang panen, timbangan, dan plastik pengemasan. Tiga kelompok memiliki keranjang panen berukuran sedang dengan jumlah antara 3 hingga 6 unit pada setiap kelompok, sedangkan dua kelompok lainnya memiliki 3 unit keranjang berukuran besar. Selain itu, setiap kelompok memiliki 1 unit timbangan dengan kapasitas 10 kilogram yang digunakan untuk menimbang hasil panen sebelum dipasarkan. Untuk kegiatan pengemasan, seluruh kelompok memanfaatkan kantong plastik sederhana (asoy) sebagai wadah hasil panen sebelum didistribusikan kepada konsumen.

Sarana pascapanen tersebut dimanfaatkan secara langsung setelah kegiatan panen selesai dilakukan. Hasil panen yang berasal dari demplot maupun pekarangan anggota terlebih dahulu dikumpulkan ke dalam keranjang panen. Keranjang-keranjang tersebut digunakan untuk memudahkan pengangkutan hasil panen dari lokasi budidaya menuju tempat pengumpulan sekaligus mengurangi kerusakan fisik pada sayuran selama proses pemindahan. Setelah seluruh hasil panen terkumpul, produk ditimbang menggunakan timbangan berkapasitas 10 kilogram untuk mengetahui jumlah produksi yang dihasilkan. Sebagai contoh, pada setiap periode panen kelompok mampu memasarkan sekitar 10–15 kilogram cabai. Proses penimbangan dilakukan sebagai dasar dalam menentukan jumlah produk yang akan dijual. Selanjutnya, hasil panen dikemas menggunakan kantong plastik (asoy) sebelum dipasarkan kepada masyarakat sekitar, toko sayur, maupun konsumen yang melakukan pemesanan melalui WhatsApp Group dan Facebook.

Meskipun kemasan yang digunakan masih berupa kantong plastik sederhana dan belum menggunakan label atau merek kelompok, sarana pascapanen yang tersedia telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Penggunaan 3–6 unit keranjang panen pada sebagian besar kelompok maupun 3 unit keranjang berukuran besar pada kelompok lainnya mampu mendukung proses pengumpulan dan pengangkutan hasil panen secara lebih efisien. Keberadaan 1 unit timbangan berkapasitas 10 kilogram di setiap kelompok juga memudahkan penentuan jumlah hasil panen yang dipasarkan sehingga transaksi menjadi lebih transparan. Sementara itu, penggunaan plastik

pengemasan membantu menjaga kebersihan produk selama proses distribusi kepada konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun teknologi pengemasan yang digunakan masih sederhana, sarana pascapanen telah berperan dalam menjaga mutu produk dan memperlancar proses pemasaran hasil budidaya kelompok.

Pada komponen penanganan pascapanen, hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 100% dengan ketentuan Juknis P2L. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Fauzi et al. (2022), yang menunjukkan bahwa penanganan pascapanen pada KWT Jati Mandiri telah sesuai dengan Juknis, yaitu hasil sayuran dikemas menggunakan wadah dan ditutup dengan plastik sehingga siap dipasarkan. Kesamaan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penanganan pascapanen pada kedua lokasi telah dilaksanakan sesuai dengan standar program. Dengan demikian, tidak terdapat kesenjangan antara ketentuan Juknis dan pelaksanaan penanganan pascapanen di lapangan.

5. Pendampingan dan Pengawasan

Berdasarkan Tabel 17 diketahui bahwa komponen pendampingan dan pengawasan memperoleh skor sebesar 128 dan berada pada kategori sesuai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program P2L telah berjalan sesuai dengan ketentuan program.

Tabel 10. Hasil evaluasi Pendampingan dan Pengawasan

No	Indikator	Ya	Tidak	skor	Kategori
1.	Kelompok menerima monitoring penggunaan	32		32	Sesuai
2.	Pendamping melakukan pemantauan kegiatan budidaya secara berkala	32		32	Sesuai
3.	Kelompok membuat pelaporan kegiatan sesuai ketentuan program	32		32	Sesuai
4.	Terdapat kegiatan evaluasi pelaksanaan program P2L oleh pendamping	32		32	Sesuai
Total				128	Sesuai

Kegiatan pendampingan dilaksanakan secara rutin oleh penyuluh pertanian dari BPP Marapalam dengan frekuensi satu kali setiap bulan. Selain kunjungan rutin

tersebut, penyuluh juga melakukan pendampingan di luar jadwal apabila kelompok mengalami kendala dalam pelaksanaan budidaya maupun pengelolaan kelompok. Pada setiap kunjungan, penyuluh tidak hanya memberikan arahan mengenai teknik budidaya, tetapi juga melakukan diskusi bersama anggota mengenai perkembangan tanaman, permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan. Melalui kegiatan tersebut, anggota memperoleh bimbingan secara langsung sehingga berbagai kendala dapat segera ditangani tanpa harus menunggu pertemuan berikutnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis, kegiatan pengawasan juga dilakukan terhadap penggunaan bantuan program. Berdasarkan hasil penelitian, penyuluh bersama Dinas Pangan melakukan monitoring terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada kelompok, seperti rumah benih, demplot, sarana pascapanen, serta berbagai input produksi lainnya. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh bantuan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan Program P2L dan tidak dialihkan untuk kepentingan di luar kegiatan kelompok. Selain itu, perkembangan budidaya di demplot maupun pekarangan anggota juga dipantau secara berkala untuk mengetahui kondisi pertumbuhan tanaman serta mengevaluasi penerapan teknik budidaya yang telah diberikan melalui kegiatan pendampingan.

Pengawasan juga diwujudkan melalui pelaksanaan administrasi dan pelaporan kegiatan kelompok. Berdasarkan hasil penelitian, setiap kelompok diwajibkan menyusun laporan secara berkala mulai dari penerimaan bantuan, pelaksanaan kegiatan budidaya, hingga pemanfaatan hasil panen. Laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban kelompok terhadap pelaksanaan Program P2L sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penyuluh dan Dinas Pangan dalam menilai perkembangan kegiatan. Pada tahap awal pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan oleh penyuluh pertanian, tetapi juga melibatkan Dinas Pangan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan, termasuk penggunaan dana bantuan, telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Program P2L.

Pada aspek pendampingan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan Program P2L di wilayah kerja BPP Marapalam telah

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dengan tingkat kesesuaian sebesar 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat kesenjangan antara standar pendampingan dengan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Fauzi et al. (2022) pada KWT Jati Mandiri, yang memperoleh efektivitas pendampingan sebesar 91,67%. Pada penelitian tersebut, pendampingan administrasi dan penyusunan laporan telah berjalan sangat efektif, sedangkan pendampingan teknis masih mencapai 75% karena belum dilakukan secara optimal hingga tingkat pekarangan rumah tangga anggota KWT. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan di wilayah kerja BPP Marapalam relatif lebih sesuai dengan ketentuan program dibandingkan dengan kondisi pada penelitian Fauzi et al. (2022)..

E. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Berdasarkan Indikator

Untuk mengetahui tingkat penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2023 di BPP Marapalam Kota Padang, dilakukan pengukuran terhadap sepuluh prinsip pemberdayaan menurut Mardikanto (2010). Penilaian didasarkan pada tanggapan responden menggunakan skala Likert dengan kategori setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Penerapan prinsip pemberdayaan disajikan pada Tabel 18.

Tabel 11. Hasil Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Berdasarkan Variabel

No	Variabel	Skor	Kategori
1.	Kesukarelaan	213	Penerapan sedang
2.	Otonom	214	Penerapan sedang
3.	Keswadayaan	245	Penerapan tinggi
4.	Partisipatif	263	Penerapan tinggi
5.	Egaliter	251	Penerapan tinggi
6.	Demokrasi	272	Penerapan tinggi
7.	Keterbukaan	265	Penerapan tinggi
8.	Kebersamaan	250	Penerapan tinggi
9.	Akuntabilitas	272	Penerapan tinggi
10.	Desentralisasi	250	Penerapan tinggi
Total		2.495	Menerapkan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2023 di wilayah kerja BPP Marapalam memperoleh skor total sebesar 2.495 dengan kategori menerapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program P2L telah mencerminkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto, yaitu kesukarelaan, otonom, keswadayaan, partisipatif, egaliter, demokrasi, keterbukaan, kebersamaan, akuntabilitas, dan desentralisasi.

Menurut Mardikanto (2010), pemberdayaan merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengenali permasalahan, mengambil keputusan, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, serta mengembangkan kemandirian dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan Program P2L tidak hanya dilihat dari peningkatan produksi pangan rumah tangga, tetapi juga dari sejauh mana kelompok wanita tani mampu menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam pengelolaan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip pemberdayaan telah diterapkan dengan baik. Prinsip demokrasi dan akuntabilitas memperoleh skor tertinggi, masing-masing sebesar 272, diikuti keterbukaan sebesar 265 dan partisipatif sebesar 263. Tingginya skor pada prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kelompok telah memiliki tata kelola organisasi yang cukup baik, ditandai dengan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, transparansi pengelolaan kegiatan, serta kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan dan pelaksanaan program. Di sisi lain, prinsip kesukarelaan dan otonom memperoleh skor paling rendah dibandingkan prinsip lainnya yang berada dalam kategori kurang menerapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masih memerlukan penguatan, terutama dalam membangun kesadaran partisipasi yang sepenuhnya lahir dari inisiatif anggota serta meningkatkan kemandirian kelompok dalam menghadapi berbagai permasalahan tanpa bergantung pada pihak luar.

Secara umum, tingginya penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan tidak terlepas dari kuatnya modal sosial yang dimiliki kelompok wanita tani. Sebagian besar anggota berasal dari lingkungan yang sama sehingga hubungan sosial yang

terjalin cukup erat. Kedekatan tersebut mempermudah koordinasi kegiatan, meningkatkan kepercayaan antaranggota, serta memperkuat semangat gotong royong dalam menjalankan Program P2L. Selain itu, keberadaan kas kelompok yang berasal dari iuran anggota dan hasil penjualan panen turut mendukung keberlanjutan kegiatan meskipun bantuan pemerintah sempat terhenti., terdapat penjelasan dari prinsip-prinsip pemberdayaan berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Kesukarelaan

Menurut Mardikanto (2010), prinsip kesukarelaan merupakan keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada kesadaran, kemauan, dan inisiatif sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain. Adapun skor yang diperoleh pada indikator kesukarelaan disajikan pada Tabel 19.

Tabel 12. Hasil Penerapan prinsip Kesukarelaan

NO	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Skor	Kategori
1.	Mengikuti kegiatan P2L atas kemauan sendiri	66	8	6	80	
2.	Termotivasi memperbaiki kondisi pangan keluarga	30	34	5	69	
3.	Keterlibatan muncul dari kesadaran pribadi	39	12	13	64	
Total					213	Penerapan sedang

Berdasarkan Tabel 18, pada indikator mengikuti kegiatan P2L atas kemauan sendiri, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 66. Perolehan skor tertinggi pada jawaban setuju menunjukkan bahwa sebagian besar anggota mengikuti Program P2L atas kemauan sendiri karena adanya keinginan untuk terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi diri dan keluarganya. Responden yang memberikan penilaian setuju mengaku mengikuti Program P2L atas kemauan sendiri karena menyadari pentingnya program bagi diri dan keluarganya. Sementara itu, masih terdapat anggota yang keterlibatannya dipengaruhi oleh ajakan anggota kelompok

lain, keinginan untuk bersosialisasi, maupun dorongan dari ketua kelompok. Secara keseluruhan, indikator ini memperoleh total skor 80, yang menunjukkan bahwa kemauan anggota untuk mengikuti kegiatan atas keinginan sendiri merupakan aspek yang relatif kuat dalam prinsip kesukarelaan.

Pada indikator termotivasi memperbaiki kondisi pangan keluarga, jawaban kurang setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 34. Tingginya skor pada jawaban kurang setuju menunjukkan bahwa motivasi untuk memperbaiki kondisi pangan keluarga belum sepenuhnya menjadi alasan utama anggota dalam mengikuti Program P2L. Sebagian anggota lebih tertarik pada bantuan yang diberikan program dibandingkan tujuan untuk memperbaiki kondisi pangan keluarga, sedangkan sebagian lainnya mengikuti kegiatan tanpa memiliki motivasi khusus atau karena pengaruh anggota kelompok lainnya. Secara keseluruhan, indikator ini memperoleh total skor 69. Skor tersebut menunjukkan bahwa motivasi anggota untuk memperbaiki kondisi pangan keluarga masih belum kuat dan perlu mendapat perhatian dalam penerapan prinsip kesukarelaan.

Pada indikator keterlibatan muncul dari kesadaran pribadi, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 39. Perolehan skor tertinggi pada jawaban setuju menunjukkan bahwa sebagian besar anggota telah memiliki kesadaran pribadi untuk terlibat dalam Program P2L karena menyadari manfaat kegiatan bagi diri dan keluarganya. Namun, masih terdapat anggota yang keterlibatannya lebih dipengaruhi oleh ketertarikan terhadap bantuan program, kesempatan untuk bersosialisasi, maupun pengaruh dari pihak lain. Secara keseluruhan, indikator ini memperoleh total skor 64, yang merupakan skor terendah dibandingkan indikator lainnya pada prinsip kesukarelaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kesadaran pribadi telah muncul pada sebagian besar anggota, aspek keterlibatan yang benar-benar didasarkan pada kesadaran pribadi masih relatif lebih lemah dibandingkan aspek kesukarelaan lainnya.

Berdasarkan teori Totok Mardikanto (2010), prinsip kesukarelaan dalam pemberdayaan tidak hanya ditunjukkan oleh keikutsertaan masyarakat tanpa adanya paksaan, tetapi juga didukung oleh tumbuhnya kesadaran terhadap tujuan kegiatan

yang diikuti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota telah bergabung dalam Program P2L atas kemauan sendiri, sehingga mencerminkan adanya penerapan prinsip kesukarelaan. Namun demikian, hasil pada indikator motivasi dan kesadaran menunjukkan bahwa sebagian anggota masih lebih berorientasi pada bantuan program dibandingkan tujuan pemberdayaan yang ingin dicapai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesukarelaan anggota belum sepenuhnya didukung oleh motivasi intrinsik yang kuat. Dengan demikian, proses pemberdayaan dalam Program P2L telah berhasil mendorong anggota untuk berpartisipasi secara sukarela, tetapi masih memerlukan penguatan dalam membangun kesadaran dan pemahaman agar keterlibatan anggota didasarkan pada komitmen terhadap tujuan program, bukan semata-mata pada manfaat yang diterima.

2. Otonom

Menurut Menurut Mardikanto (2010), prinsip otonom merupakan kemampuan masyarakat untuk menentukan pilihan, mengambil keputusan, serta mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Kemandirian tersebut tidak berarti masyarakat menolak bantuan dari pihak luar, melainkan memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan, mengambil keputusan, dan menyelesaikan permasalahan tanpa bergantung sepenuhnya pada pendamping atau lembaga pemberi bantuan. Dalam pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), prinsip otonom tercermin dari kemampuan kelompok dalam menjalankan kegiatan secara mandiri, Penerapan prinsip otonom dalam pelaksanaan Program P2L disajikan pada Tabel 20.

Tabel 13. Kategori penilaian pada prinsip Otonom

No	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Skor	Kategori
1.	Kelompok mampu menjalankan kegiatan secara mandiri	24	26	11	61	
2.	Anggota mampu membuat keputusan sendiri	60	8	8	76	
3.	Kelompok mampu	57	14	6	77	

No	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Skor	Kategori
	menyelesaikan masalah sendiri					
Total					214	Penerapan sedang

Berdasarkan Tabel 19, pada indikator kelompok mampu menjalankan kegiatan secara mandiri, jawaban kurang setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 26. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok belum sepenuhnya mampu menjalankan seluruh kegiatan P2L secara mandiri dan masih memerlukan arahan penyuluh, terutama dalam kegiatan budidaya, evaluasi, penentuan benih, dan penggunaan dana kelompok. Secara keseluruhan, indikator ini memperoleh skor 61, yang merupakan skor terendah pada prinsip otonom. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian kelompok dalam menjalankan kegiatan masih perlu diperkuat.

Pada indikator anggota mampu membuat keputusan sendiri, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 60. Hal ini menunjukkan bahwa anggota telah mampu terlibat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah, terutama dalam pembagian tugas, penjadwalan kegiatan, dan pengelolaan hasil. Namun, pada kondisi tertentu kelompok masih memerlukan masukan dari penyuluh. Indikator ini memperoleh skor total 76, yang menunjukkan bahwa kemampuan anggota dalam membuat keputusan sendiri telah diterapkan dengan baik.

Pada indikator kelompok mampu menyelesaikan masalah sendiri, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 57. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok umumnya mampu menyelesaikan permasalahan internal melalui musyawarah, meskipun masih memerlukan bantuan penyuluh dalam menghadapi permasalahan teknis budidaya. Indikator ini memperoleh skor total 77, yang merupakan skor tertinggi pada prinsip otonom. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menyelesaikan masalah merupakan aspek yang paling kuat dalam penerapan prinsip otonom.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip otonom dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) masih kurang diterapkan. Sebagian anggota telah

mampu mengambil keputusan melalui musyawarah serta menyelesaikan permasalahan internal kelompok secara bersama-sama. Namun, pada beberapa aspek teknis seperti pemilihan benih, penggunaan sarana produksi, dan penyelesaian kendala budidaya, kelompok masih membutuhkan arahan dari penyuluh. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian kelompok dalam pelaksanaan Program P2L masih belum optimal.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Muslim (2017) yang menyatakan bahwa salah satu kendala dalam program pemberdayaan masyarakat adalah belum optimalnya kemandirian masyarakat akibat masih adanya ketergantungan terhadap pihak pendamping. Meskipun penelitian Muslim dilakukan pada program PNPM, bukan P2L, hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan membutuhkan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola kegiatan secara mandiri. Sejalan dengan penelitian tersebut, kelompok P2L dalam penelitian ini masih membutuhkan pendampingan penyuluh pada aspek teknis sehingga penerapan prinsip otonom belum optimal.

3. Keswadayaan

Menurut Mardikanto (2010), keswadayaan merupakan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan, menggerakkan, dan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Prinsip ini menekankan pentingnya kemampuan masyarakat dalam mengandalkan kekuatan internal, baik berupa kemampuan anggota, kerja sama, tanggung jawab, maupun sumber daya yang tersedia, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak selalu bergantung pada bantuan dari pihak luar.. Adapun skor penerapan prinsip keswadayaan dalam pelaksanaan Program P2L disajikan pada Tabel 21.

Tabel 14. Kategori penilaian pada prinsip Keswadayaan

NO	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Skor	Kategori
1.	Kelompok merencanakan	51	30	0	81	

	kegiatan P2L sesuai kebutuhan anggota.				
2.	Anggota melaksanakan kegiatan P2L dengan penuh tanggung jawab.	84	4	2	90
3.	Kegiatan P2L tetap berjalan meskipun tidak ada bantuan luar.	39	32	3	74
Total					245 Penerapan tinggi

Berdasarkan Tabel 21, pada indikator kelompok merencanakan kegiatan P2L sesuai kebutuhan anggota, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 51. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan umumnya disusun melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi anggota, seperti penentuan jadwal tanam, jenis tanaman, dan pembagian tugas. Namun, penyusunan rencana tetap mengacu pada ketentuan Petunjuk Teknis (Juknis) P2L Tahun 2023. Indikator ini memperoleh skor total 81, yang menunjukkan bahwa kelompok telah mampu merencanakan kegiatan sesuai kebutuhan anggota.

Pada indikator anggota melaksanakan kegiatan P2L dengan penuh tanggung jawab, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 84. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota telah melaksanakan tugas yang disepakati, seperti merawat tanaman, menjaga sarana dan prasarana, serta memanfaatkan bantuan program dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa anggota yang belum berpartisipasi secara optimal karena kesibukan pekerjaan dan aktivitas rumah tangga. Indikator ini memperoleh skor total 90, yang merupakan skor tertinggi pada prinsip keswadayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab anggota merupakan aspek yang paling kuat dalam penerapan prinsip keswadayaan.

Pada indikator kegiatan P2L tetap berjalan meskipun tidak ada bantuan luar, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 39. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pada umumnya tetap berupaya melanjutkan kegiatan dengan memanfaatkan kas kelompok untuk memenuhi kebutuhan budidaya. Namun, kemampuan kelompok masih terbatas karena apabila kas tidak mencukupi, anggota harus melakukan iuran atau menunggu bantuan dari pihak luar. Indikator ini

memperoleh skor total 74, yang merupakan skor terendah pada prinsip keswadayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan kegiatan P2L tanpa bantuan dari luar masih perlu diperkuat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelompok telah berupaya mengembangkan keswadayaan melalui pemanfaatan kas kelompok serta pelaksanaan kegiatan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Namun, keberlangsungan kegiatan masih dipengaruhi oleh bantuan dari pemerintah ketika sumber daya kelompok tidak mencukupi.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Fauzi dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari tidak hanya ditentukan oleh adanya bantuan program, tetapi juga oleh kemampuan kelompok mengadopsi dan melaksanakan inovasi hingga menjadi kebiasaan yang dilakukan secara mandiri. Sejalan dengan penelitian tersebut, kelompok P2L dalam penelitian ini telah menunjukkan upaya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mempertahankan kegiatan. Namun, kemampuan tersebut belum sepenuhnya berkembang karena pada kondisi tertentu kelompok masih bergantung pada bantuan dari luar untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program.

4. Partisipatif

Menurut Menurut Mardikanto (2010), partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kegiatan. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran masyarakat dalam suatu kegiatan, tetapi juga sebagai keterlibatan dalam memberikan gagasan, menyampaikan kebutuhan, mengambil keputusan, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program. Adapun skor pada prinsip partisipasi disajikan pada Tabel 22.

Tabel 15. Kategori penilaian pada prinsip Partisipatif

NO	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Skor	Kategori
1.	Semua anggota dilibatkan	75	4	5	84	

NO	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Skor	Kategori
2.	dalam perencanaan kegiatan P2L. Semua anggota ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan P2L.	75	12	1	88	
3.	Anggota berperan dalam evaluasi hasil kegiatan P2L.	81	10	0	91	
Total					263	Penerapan tinggi

Berdasarkan Tabel 22, pada indikator semua anggota dilibatkan dalam perencanaan kegiatan P2L, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 75. Hal ini menunjukkan bahwa anggota pada umumnya telah dilibatkan dalam perencanaan melalui musyawarah dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Namun, perencanaan kegiatan tetap harus menyesuaikan ketentuan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) P2L Tahun 2023 sehingga tidak seluruh usulan anggota dapat diterapkan. Indikator ini memperoleh skor total 84, yang menunjukkan bahwa keterlibatan anggota dalam perencanaan kegiatan telah diterapkan dengan baik.

Pada indikator semua anggota ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan P2L, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 75. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti budidaya tanaman, rapat kelompok, gotong royong, pemeliharaan, dan pemanenan. Namun, tidak semua anggota dapat mengikuti seluruh kegiatan karena adanya pembagian tugas dan kesibukan masing-masing. Indikator ini memperoleh skor total 88, yang menunjukkan bahwa keterlibatan anggota dalam pelaksanaan kegiatan telah diterapkan dengan baik.

Pada indikator anggota berperan dalam evaluasi hasil kegiatan P2L, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 81. Hal ini menunjukkan bahwa anggota pada umumnya telah dilibatkan dalam kegiatan evaluasi melalui musyawarah atau evaluasi bulanan untuk membahas perkembangan kegiatan, kendala, dan rencana tindak lanjut. Meskipun demikian, tidak seluruh anggota dapat berperan secara aktif karena

keterlibatan dalam evaluasi masih menyesuaikan kondisi anggota dan ketentuan pelaksanaan program. Indikator ini memperoleh skor total 91, yang merupakan skor tertinggi pada prinsip partisipatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anggota dalam evaluasi merupakan aspek yang paling kuat dalam penerapan prinsip partisipatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip partisipatif dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah diterapkan dengan baik. Sebagian besar anggota terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan melalui musyawarah kelompok. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa anggota tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga ikut berkontribusi dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Meskipun demikian, partisipasi anggota belum sepenuhnya optimal karena pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) P2L Tahun 2023 dan tidak semua anggota dapat mengikuti seluruh kegiatan akibat pembagian tugas maupun kesibukan masing-masing.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Antika dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa peran penyuluh sebagai fasilitator, motivator, dan pendamping berhubungan positif dengan meningkatnya partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani dalam pelaksanaan Program P2L. Kondisi tersebut juga terlihat dalam penelitian ini, di mana penyuluh berperan memfasilitasi musyawarah, memberikan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan, serta mendampingi proses evaluasi kelompok. Peran tersebut mendorong keterlibatan anggota pada setiap tahapan kegiatan, meskipun tingkat partisipasi masing-masing anggota masih dipengaruhi oleh kondisi pribadi dan ketentuan pelaksanaan program.

5. Egaliter

Menurut Mardikanto (2010), prinsip Egaliter menempatkan seluruh anggota masyarakat dalam kedudukan yang sama tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang lainnya. Dalam proses pemberdayaan, setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini penting karena dapat menciptakan

rasa memiliki terhadap program dan mendorong partisipasi aktif seluruh anggota kelompok. Adapun skor dari prinsip Egaliter disajikan dalam Tabel 23.

Tabel 16. Kategori penilaian prinsip Egaliter

NO	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Skor	Kategori
1.	Tidak ada anggota yang mendominasi dalam kelompok.	81	8	1	90	
2.	Setiap pendapat anggota dihargai dan diperlakukan sama.	21	42	4	67	
3.	Semua anggota diperlakukan setara dalam kegiatan P2L	90	4	0	94	
Total					251	Penerapan tinggi

Berdasarkan Tabel 22, pada indikator tidak ada anggota yang mendominasi dalam kelompok, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 81. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kelompok pada umumnya tidak didominasi oleh satu anggota karena pembagian tugas dan keterlibatan anggota dilakukan secara adil. Meskipun demikian, dalam beberapa kondisi ketua kelompok masih terlihat lebih dominan dalam memimpin kegiatan dan mengarahkan diskusi. Indikator ini memperoleh skor total 90, yang menunjukkan bahwa tidak adanya dominasi anggota telah diterapkan dengan baik dalam kelompok.

Pada indikator setiap pendapat anggota dihargai dan diperlakukan sama, jawaban kurang setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 42. Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadap pendapat anggota belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Meskipun musyawarah telah dilakukan dan anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sebagian responden menilai bahwa pendapat ketua atau anggota tertentu masih lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Indikator ini memperoleh skor total 67, yang merupakan skor terendah pada prinsip egaliter. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan dalam menghargai pendapat anggota masih perlu diperkuat.

Pada indikator semua anggota diperlakukan setara dalam kegiatan P2L, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 90. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota merasakan adanya perlakuan yang setara dalam pembagian tugas dan keterlibatan dalam kegiatan P2L. Meskipun pengurus kelompok lebih sering terlibat dalam tugas koordinasi, kondisi tersebut tidak secara umum menimbulkan perlakuan yang membedakan anggota. Indikator ini memperoleh skor total 94, yang merupakan skor tertinggi pada prinsip egaliter. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlakuan setara terhadap seluruh anggota merupakan aspek yang paling kuat dalam penerapan prinsip egaliter.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip egaliter dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah diterapkan dengan baik. Sebagian besar anggota menilai bahwa tidak terdapat dominasi yang berlebihan dalam kelompok dan seluruh anggota memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan. Kesetaraan tersebut tercermin dari pembagian tugas yang disesuaikan dengan kemampuan anggota serta perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, penghargaan terhadap pendapat anggota belum sepenuhnya dirasakan secara merata karena dalam beberapa kondisi pendapat ketua kelompok masih lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antaranggota telah berjalan secara setara, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan penghargaan terhadap pendapat seluruh anggota.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Al Nido dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat mampu meningkatkan kerja sama, rasa saling percaya, solidaritas, dan kohesivitas dalam Kelompok Wanita Tani. Hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan dan kerja sama tersebut mendorong terciptanya interaksi yang lebih setara antaranggota dalam menjalankan kegiatan kelompok. Sejalan dengan penelitian tersebut, kelompok P2L dalam penelitian ini telah menunjukkan adanya pembagian peran yang adil dan perlakuan yang setara terhadap anggota. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dominasi pendapat ketua

kelompok dalam situasi tertentu masih memengaruhi persepsi sebagian anggota terhadap kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan.

6. Demokrasi

Menurut Mardikanto (2010), prinsip demokrasi dalam pemberdayaan masyarakat ditandai dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan pandangan, serta mengambil keputusan melalui musyawarah. Adapun skor yang diperoleh pada prinsip demokrasi disajikan pada Tabel 24.

Tabel 17. Kategori penilaian pada Prinsip Demokrasi



NO	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Skor	Kategori
1.	Setiap anggota diberi kesempatan menyampaikan pendapat	81	10	0	91	
2.	Setiap perbedaan pendapat tetap dihargai oleh anggota lainnya	84	8	0	92	
3.	Keputusan kelompok diambil secara musyawarah	75	14	0	89	
Total					272	Penerapan tinggi

Berdasarkan Tabel 23, pada indikator setiap anggota diberi kesempatan menyampaikan pendapat, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 81. Hal ini menunjukkan bahwa anggota pada umumnya telah diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan saran, pendapat, dan masukan melalui kegiatan musyawarah. Namun, masih terdapat beberapa anggota yang kurang aktif dalam menyampaikan pendapat. Indikator ini memperoleh skor total 91, yang menunjukkan bahwa kesempatan anggota untuk menyampaikan pendapat telah diterapkan dengan baik.

Pada indikator setiap perbedaan pendapat tetap dihargai oleh anggota lainnya, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 84. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat pada umumnya dapat diterima dan dijadikan bahan pertimbangan dalam musyawarah untuk memperoleh keputusan terbaik bagi kelompok. Meskipun demikian, pada beberapa kondisi pendapat ketua atau anggota yang lebih berpengalaman masih cenderung lebih mudah diterima. Indikator ini memperoleh skor total 92, yang merupakan skor tertinggi pada prinsip demokrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghargaan terhadap perbedaan pendapat merupakan aspek yang paling kuat dalam penerapan prinsip demokrasi.

Pada indikator keputusan kelompok diambil secara musyawarah, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 75. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang berkaitan dengan kegiatan P2L pada umumnya dibahas bersama melalui musyawarah. Namun, dalam beberapa kondisi keputusan akhir masih lebih banyak mengikuti usulan ketua kelompok atau anggota yang dianggap lebih berpengalaman. Indikator ini memperoleh skor total 89, yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan melalui musyawarah telah diterapkan dengan baik dalam kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip demokrasi dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah diterapkan dengan baik. Sebagian besar anggota menyatakan bahwa setiap keputusan kelompok diambil melalui musyawarah yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, perbedaan pendapat pada umumnya dihargai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan bersama. Meskipun demikian, pada beberapa kondisi pendapat ketua kelompok atau anggota yang lebih berpengalaman masih cenderung lebih memengaruhi keputusan akhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan telah berlangsung secara demokratis, meskipun pengaruh tokoh tertentu dalam kelompok masih terlihat pada beberapa situasi.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Al Nido dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat mampu meningkatkan rasa saling percaya, kerja sama, dan kohesivitas dalam Kelompok Wanita Tani. Kepercayaan dan kerja sama tersebut mendorong terciptanya musyawarah yang efektif serta

pengambilan keputusan yang melibatkan anggota kelompok. Sejalan dengan penelitian tersebut, kelompok P2L dalam penelitian ini telah membiasakan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan pendapat. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu keputusan kelompok masih dipengaruhi oleh pendapat ketua atau anggota yang lebih berpengalaman, sehingga proses demokrasi dalam kelompok masih dapat terus ditingkatkan agar partisipasi setiap anggota semakin optimal.

7. Keterbukaan

Menurut Mardikanto (2010), keterbukaan merupakan prinsip yang menekankan pentingnya transparansi informasi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Informasi mengenai kegiatan, penggunaan sumber daya, maupun hasil yang dicapai harus dapat diakses oleh seluruh anggota sehingga dapat menciptakan kepercayaan dan mengurangi potensi konflik dalam kelompok. Adapun skor yang diperoleh pada prinsip Keterbukaan disajikan dalam Tabel 25.

Tabel 18. Kategori penilaian pada Prinsip Keterbukaan

NO	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Skor	Kategori
1.	Informasi kegiatan P2L disampaikan secara terbuka kepada anggota	84	8	0	92	
2	Anggota saling percaya dalam menjalankan kegiatan P2L	75	14	0	89	
3.	Pengelolaan dana/bantuan dilakukan secara transparan	63	20	1	84	
Total					265	Penerapan tinggi

Berdasarkan Tabel 25, pada indikator informasi kegiatan P2L disampaikan secara terbuka kepada anggota, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 84. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai perkembangan dan rencana kegiatan pada umumnya telah disampaikan secara terbuka melalui musyawarah atau pertemuan kelompok. Namun, masih terdapat beberapa anggota yang belum selalu menerima informasi secara langsung, terutama apabila tidak hadir dalam pertemuan. Indikator ini memperoleh skor total 92, yang merupakan skor tertinggi pada prinsip keterbukaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi secara terbuka merupakan aspek yang paling kuat dalam penerapan prinsip keterbukaan.

Pada indikator anggota saling percaya dalam menjalankan kegiatan P2L, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 75. Hal ini menunjukkan bahwa antaranggota pada umumnya telah memiliki rasa saling percaya yang tercermin melalui kerja sama dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, dalam beberapa kegiatan masih terdapat anggota yang lebih mengandalkan ketua atau pengurus kelompok. Indikator ini memperoleh skor total 89, yang menunjukkan bahwa rasa saling percaya antaranggota telah diterapkan dengan baik.

Pada indikator pengelolaan dana atau bantuan dilakukan secara transparan, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 63. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana dan bantuan pada umumnya telah disampaikan kepada anggota melalui evaluasi atau pertemuan kelompok. Namun, keterbukaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh anggota karena buku kas masih dipegang oleh pengurus dan tidak selalu dapat diakses secara langsung. Indikator ini memperoleh skor total 84, yang merupakan skor terendah pada prinsip keterbukaan..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah diterapkan dengan baik. Sebagian besar anggota menyatakan bahwa informasi mengenai kegiatan P2L disampaikan secara terbuka melalui musyawarah atau pertemuan kelompok sehingga seluruh anggota mengetahui perkembangan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, hubungan antaranggota juga didasarkan pada rasa saling percaya dalam menjalankan tugas yang telah disepakati. Meskipun demikian, transparansi pengelolaan dana

belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh anggota karena buku kas masih dikelola oleh pengurus kelompok sehingga tidak semua anggota dapat mengakses pencatatan keuangan secara langsung..

Temuan ini sejalan dengan penelitian Al Nido dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan salah satu unsur modal sosial yang berperan penting dalam memperkuat kerja sama dan kohesivitas Kelompok Wanita Tani. Kepercayaan tersebut dibangun melalui hubungan yang terbuka, komunikasi yang baik, serta adanya keyakinan antaranggota dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Kondisi yang sama juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana keterbukaan informasi dan rasa saling percaya telah mendukung pelaksanaan kegiatan Program P2L. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana masih belum sepenuhnya optimal karena akses terhadap pencatatan keuangan masih terbatas pada pengurus kelompok, sehingga keterbukaan dalam aspek administrasi perlu terus ditingkatkan.

8. Kebersamaan

Menurut Mardikanto (2010), kebersamaan merupakan prinsip yang menekankan pentingnya kerja sama, gotong royong, dan solidaritas sosial dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan pemberdayaan, kebersamaan menjadi modal sosial yang dapat memperkuat keberlanjutan program. Adapun skor yang diperoleh pada prinsip Kebersamaan disajikan dalam Tabel 26.

Tabel 19. Kategori penilaian pada Prinsip Kebersamaan

NO	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Skor	Kategori
1.	Anggota saling membantu dalam kegiatan P2L	69	14	2	85	
2.	Kebersamaan dijunjung tinggi dalam kelompok	63	20	1	84	
3.	Kegiatan P2L dilakukan dengan semangat gotong royong	54	26	1	81	
Total					250	Penerapan tinggi

Berdasarkan Tabel 26, pada indikator anggota saling membantu dalam kegiatan P2L, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 69. Hal ini menunjukkan bahwa anggota pada umumnya telah saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan, terutama pada saat kegiatan gotong royong, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Namun, masih terdapat beberapa anggota yang kurang aktif atau lebih mengutamakan pekerjaan masing-masing. Indikator ini memperoleh skor total 85, yang merupakan skor tertinggi pada prinsip kebersamaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sikap saling membantu merupakan aspek yang paling kuat dalam penerapan prinsip kebersamaan.

Pada indikator kebersamaan dijunjung tinggi dalam kelompok, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 63. Hal ini menunjukkan bahwa kebersamaan dalam kelompok pada umumnya telah terjalin melalui pertemuan rutin dan komunikasi antaranggota. Namun, tidak semua anggota dapat hadir secara konsisten sehingga rasa kebersamaan belum dirasakan secara optimal oleh seluruh anggota. Indikator ini memperoleh skor total 84, yang menunjukkan bahwa kebersamaan dalam kelompok telah diterapkan dengan baik.

Pada indikator kegiatan P2L dilakukan dengan semangat gotong royong, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 54. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan seperti penanaman, pemeliharaan, dan pembersihan lahan pada umumnya dilakukan secara bersama-sama. Namun, masih terdapat anggota yang kurang aktif atau tidak selalu hadir dalam setiap kegiatan. Indikator ini memperoleh skor total 81, yang merupakan skor terendah pada prinsip kebersamaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semangat gotong royong telah diterapkan, tetapi belum sepenuhnya merata di antara seluruh anggota kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kebersamaan dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah diterapkan dengan baik. Anggota kelompok saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan, menjunjung tinggi kebersamaan melalui pertemuan rutin, serta melaksanakan kegiatan secara gotong royong. Meskipun demikian, tingkat keaktifan anggota masih belum merata sehingga pada beberapa kegiatan masih terdapat anggota yang kurang berpartisipasi. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa nilai kebersamaan telah tumbuh dalam kelompok, namun perlu terus diperkuat agar keterlibatan seluruh anggota menjadi lebih optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Novrianty dan Arianti (2025) yang menunjukkan bahwa keberlanjutan Program P2L dipengaruhi oleh kerja sama kelompok, tanggung jawab anggota, dan kemampuan anggota dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kerja sama yang baik mendorong anggota untuk saling mendukung dalam melaksanakan kegiatan sehingga program dapat berjalan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut juga terlihat dalam penelitian ini, di mana kebersamaan diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, saling membantu, dan pertemuan rutin kelompok.

9. Akuntabilitas

Menurut Mardikanto (2010), akuntabilitas merupakan kemampuan individu maupun kelompok untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan. Adapun skor yang diperoleh pada prinsip Akuntabilitas disajikan dalam Tabel 27.

Tabel 20. Kategori penilaian pada Prinsip Akuntabilitas

NO	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Skor	Kategori
1.	Penggunaan dana/bantuan P2L dapat dipertanggungjawabkan	78	12	0	90	
2.	Setiap kegiatan P2L terdokumentasi dengan baik	81	10	0	91	
3.	Pengurus terbuka terhadap evaluasi atau pengawasan anggota	84	6	1	91	
Total					272	Penerapan tinggi

Berdasarkan Tabel 27, pada indikator penggunaan dana atau bantuan P2L dapat dipertanggungjawabkan, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 78. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana dan bantuan pada umumnya telah dicatat dan dilaporkan kepada anggota melalui pertemuan atau evaluasi kelompok. Namun, tidak semua anggota dapat melihat rincian pengeluaran secara langsung. Indikator ini memperoleh skor total 90, yang menunjukkan bahwa penggunaan dana atau bantuan P2L telah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pada indikator setiap kegiatan P2L terdokumentasi dengan baik, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 81. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan P2L pada umumnya telah didokumentasikan dan diarsipkan melalui daftar hadir, dokumentasi kegiatan, susunan acara, serta administrasi lainnya. Namun, beberapa pencatatan dan pengarsipan masih belum selalu lengkap atau diperbarui secara rutin. Indikator ini memperoleh skor total 91, yang merupakan skor tertinggi pada prinsip akuntabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dokumentasi kegiatan merupakan salah satu aspek yang paling kuat dalam penerapan prinsip akuntabilitas.

Pada indikator pengurus terbuka terhadap evaluasi atau pengawasan anggota, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 84. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus pada umumnya memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan saran, kritik, dan masukan dalam pertemuan maupun evaluasi kelompok. Namun, tidak semua usulan anggota dapat langsung ditindaklanjuti sehingga sebagian anggota masih menilai keterbukaan pengurus perlu ditingkatkan. Indikator ini juga memperoleh skor total 91, yang merupakan skor tertinggi pada prinsip akuntabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan pengurus terhadap evaluasi dan pengawasan anggota juga menjadi aspek yang kuat dalam penerapan prinsip akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah diterapkan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari penggunaan dana dan bantuan yang dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui laporan pada setiap pertemuan, dokumentasi kegiatan yang dilakukan secara rutin, serta keterbukaan pengurus dalam menerima saran dan evaluasi dari anggota.

Meskipun demikian, masih terdapat sebagian anggota yang menilai bahwa akses terhadap rincian pencatatan keuangan dan tindak lanjut terhadap usulan anggota belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kelompok telah berjalan dengan baik, namun transparansi administrasi dan respons terhadap masukan anggota masih perlu ditingkatkan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nikmah (2021) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Program P2L telah menerapkan tahapan pemberdayaan dengan baik melalui keterlibatan masyarakat dan kolaborasi antarpihak, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan tahapan pemberdayaan yang baik memerlukan adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan agar program dapat berjalan secara transparan dan memperoleh kepercayaan dari anggota kelompok. Kondisi tersebut juga terlihat dalam penelitian ini, di mana pengurus telah menyampaikan laporan penggunaan dana, mendokumentasikan kegiatan, serta memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan evaluasi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi administrasi dan tindak lanjut atas masukan anggota masih perlu ditingkatkan agar prinsip akuntabilitas dapat diterapkan secara lebih optimal.

10. Desentralisasi

Menurut Menurut Mardikanto (2010), desentralisasi merupakan prinsip pemberdayaan yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan serta mengelola sumber daya berdasarkan kebutuhan, kondisi, dan potensi lokal yang dimiliki. Prinsip ini menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki ruang untuk menentukan arah dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi yang dihadapi, sehingga keputusan tidak sepenuhnya bergantung pada pihak luar atau ditentukan secara terpusat. Dalam pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Adapun skor penerapan prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan Program P2L disajikan pada Tabel 28.

Tabel 21. Kategori penilaian pada Prinsip Desentralisasi

NO	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Skor	Kategori
1.	Kelompok berwenang menentukan pemanfaatan lahan pekarangan anggota	66	18	1	85	
2.	Kegiatan P2L disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal	30	42	1	73	
3.	Keputusan terkait P2L lebih banyak ditentukan di tingkat kelompok	84	8	0	92	
Total					250	Penerapan tinggi

Berdasarkan Tabel 28, pada indikator kelompok berwenang menentukan pemanfaatan lahan pekarangan anggota, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 66. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok memiliki peran dalam menentukan pemanfaatan lahan pekarangan melalui kesepakatan bersama, termasuk dalam penggunaan benih dan jenis tanaman yang dibudidayakan. Namun, kewenangan tersebut tetap menyesuaikan hak anggota sebagai pemilik lahan. Indikator ini memperoleh skor total 85, yang menunjukkan bahwa kewenangan kelompok dalam menentukan pemanfaatan lahan pekarangan telah diterapkan dengan baik.

Pada indikator kegiatan P2L disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal, jawaban kurang setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 42. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan P2L belum sepenuhnya disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal karena pemilihan komoditas masih dipengaruhi oleh jenis benih yang berasal dari bantuan pemerintah. Indikator ini memperoleh skor total 73, yang merupakan skor terendah pada prinsip desentralisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian kegiatan dengan potensi sumber daya lokal masih perlu diperkuat dalam pelaksanaan Program P2L.

Pada indikator keputusan terkait P2L lebih banyak ditentukan di tingkat kelompok, jawaban setuju memperoleh skor tertinggi, yaitu 84. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan mengenai pelaksanaan kegiatan pada umumnya ditentukan melalui

musyawarah di tingkat kelompok dengan tetap mengacu pada ketentuan program. Indikator ini memperoleh skor total 92, yang merupakan skor tertinggi pada prinsip desentralisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan di tingkat kelompok merupakan aspek yang paling kuat dalam penerapan prinsip desentralisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip desentralisasi dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah diterapkan, namun belum sepenuhnya optimal. Kelompok telah memiliki kewenangan dalam menentukan pemanfaatan lahan, mengambil keputusan melalui musyawarah, serta mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan anggota. Namun demikian, kewenangan tersebut masih dibatasi oleh ketentuan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) P2L dan jenis bantuan yang diterima dari pemerintah. Akibatnya, penyesuaian kegiatan terhadap potensi sumber daya lokal belum sepenuhnya dapat dilakukan karena sebagian komoditas yang dibudidayakan masih mengikuti bantuan benih yang disediakan program.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Muslim (2017) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan belum mampu mewujudkan kemandirian masyarakat secara optimal ketika kewenangan masyarakat dalam mengelola program masih dipengaruhi oleh pihak luar. Meskipun penelitian tersebut dilakukan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), hasilnya menunjukkan bahwa pemberian ruang bagi masyarakat untuk menentukan kebutuhan dan mengelola kegiatan sesuai kondisi lokal merupakan salah satu unsur penting dalam pemberdayaan. Sejalan dengan penelitian tersebut, kelompok P2L dalam penelitian ini telah diberi kewenangan untuk mengambil keputusan melalui musyawarah. Namun, kewenangan tersebut masih dibatasi oleh ketentuan program dan bantuan yang diterima, sehingga penerapan prinsip desentralisasi belum sepenuhnya optimal.